



Penyimpangan Anggaran Rp 292 M

TEMUAN PENYIMPANGAN ANGGARAN

Pemerintah Provinsi Kalbar Rp121.877.510.000 dengan 288 kasus Rangkang Kabupaten / Kota

1. Ketapang Rp35,4 miliar dengan 176 kasus.
2. Kota Pontianak Rp34,3 miliar dengan 169 kasus.
3. Kayong Utara Rp11,5 miliar dengan 92 kasus.
4. Sanggau Rp10,9 miliar dengan 118 kasus.
5. Melawi Rp10,5 miliar dengan 112 kasus.
6. Sintang Rp10,1 miliar dengan 116 kasus.
7. Landak Rp10 miliar dengan 100 kasus.
8. Kapuas Hulu Rp9,7 miliar dengan 121 kasus.
9. Kabupaten Pontianak Rp9,2 miliar dengan 114 kasus.
10. Kota Singkawang Rp7,8 miliar dengan 145 kasus.
11. Sekadau Rp7,6 miliar dengan 100 kasus.
12. Sambas Rp5 miliar dengan 83 kasus.
13. Bengkayang Rp4,6 miliar dengan 93 kasus.
14. Kubu Raya Rp2,8 miliar dengan 77 kasus.

Sumber data : Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

PONTIANAK - Dari hasil audit BPK semester pertama tahun 2013 terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten kota Kalimantan Barat ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 292.134.870.000 dengan 1.904 kasus penyimpangan anggaran. Hasil audit ini dipaparkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Khadafy, mengatakan bahwa temuan penyimpangan anggaran

pada Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp 121.877.510.000 dengan 288 kasus penyimpangan anggaran.
Sedangkan pada level 14 kabupaten atau kota, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 170.257.360.000 dengan 1.616 kasus. "Banyak kasus penyimpangan ini, karena tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum dan pemda baik kabupaten, kota, dan provinsi."
• ke halaman 15 kolom 5



Penyimpangan Anggaran Rp 292 M

Sambungan dari halaman 9

Tidak niat baik untuk menindaklanjuti hasil auditor negara untuk setiap tahun sehingga kasus-kasus dari tahun 2009 hingga 2013 semakin menumpuk. Hasil audit BPK hanya dianggap sampah oleh pemda," kata Uchok di Pontianak, Sabtu (22/3).

Dari 14 kabupaten kota, temuan penyimpangan anggaran paling banyak adalah Kabupaten Ketapang sebesar Rp35.4 miliar dengan 176 kasus. Kedua, Kota Pontianak dengan temuan sebesar Rp34.3 miliar dengan 169 kasus. Selanjutnya Kabupaten Kayong Utara, di kabupaten itu terdapat temuan sebesar Rp11.5 miliar dengan 92 kasus. Peringkat keempat adalah Kabupaten Sanggau sebesar Rp10.9 miliar dengan 118 kasus. Kabupaten Melawi sebesar Rp10.5 miliar dengan 112 kasus. Kabupaten Sintang sebesar Rp10,1 miliar dengan 116 kasus. Kabupaten Landak sebesar Rp10 miliar dengan 100 kasus. Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp9,7 miliar dengan 121 kasus. Kabupaten Pontianak sebesar Rp9,2 miliar dengan 114 kasus. Kota Singkawang sebesar Rp7,8 miliar dengan 145 kasus. Kabupaten Sekadau sebesar Rp7,6 miliar dengan 100 kasus. Kabupaten Sambas sebesar Rp5 miliar

dengan 83 kasus. Kabupaten Bengkayang sebesar Rp4,6 miliar dengan 93 kasus, dan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp2,8 miliar dengan 77 kasus.

Uchok memaparkan pada setiap kabupaten/kota penyimpangan anggaran dilakukan dengan berbagai modus. Di Kabupaten Bengkayang modusnya berupa sebanyak 47 penerima hibah kepada organisasi bidang pendidikan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp7.137.535.000. Di Kabupaten Kapuas Hulu berupa penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp23.182.000.000 yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Pada Kabupaten Ketapang modusnya berupa penyaluran hibah 700 batang bibit tanaman lengkung senilai Rp96 juta dan 56 unit alat pertanian hand Sprayer senilai Rp27.7 juta kepada kelompok tani pada dinas pertanian.

Di Kabupaten Kubu Raya berupa belanja perjalanan dinas luar daerah pada empat SKPD terjadi lebih bayar atau mark up sebesar Rp272.226.500. Di Kabupaten Pontianak

kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh pimpinan/anggota DPRD serta pegawai sekretariat DPRD diketahui terdapat kelebihan pembayaran atau mark up biaya

perjalanan dinas kepada 53 orang dengan jumlah sebesar Rp2.534.780.500. Di Kabupaten Sanggau

realisasi belanja perjalanan dinas pada sembilan SKPD diduga fiktif sebesar Rp1.801.608.900. Di Kabupaten Sintang realisasi bantuan hibah sebesar Rp2.072.226.000, bantuan sosial sebesar Rp181.512.000,00, bantuan ADD, dan bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp1.110.508.334 belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban.

Mengapa terjadi penyimpangan anggaran? Uchok menjelaskan banyak penyimpangan anggaran disebabkan kelumpuhan fungsi dan tugas para DPRD. Seharusnya, anggota dewan melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran.

Tetapi yang terjadi fungsi dan tugas DPRD bukan mengawasi eksekutif malahan ikut-ikutan bermain proyek dalam APBD, atau kadang-kadang juga minta jatah atau bagian proyek yang mereka bahas dalam APBD. "Berubah fungsi dan tugas anggota dewan dari pengawas menjadi 'minta jatah' bagian dari proyek APBD disebabkan DPRD butuh duit buat menjalankan roda partai politik dan untuk kepentingan pribadi seperti uang kampanye agar terpilih lagi jadi DPRD," pungkasnya. **(hen)**